



Wilayah **Pesisir** **Indonesia**

**Narasi Kebijakan Publik
Masalah Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil
di Indonesia**



Dr. Dra. Kismartini, M.Si.
Prof. Dr. Burhan Bungin, M.Si., Ph.D.

Wilayah Pesisir INDONESIA

Narasi Kebijakan Publik
Masalah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
di Indonesia

Dr. Dra. Kismartini, M.Si.
Prof. Dr. Burhan Bungin, M.Si., Ph.D.



Wilayah Pesisir
INDONESIA

Narasi Kebijakan Publik
Masalah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
di Indonesia

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

WILAYAH PESISIR INDONESIA
Narasi Kebijakan Publik Masalah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Indonesia
Edisi Pertama
Copyright © 2019

ISBN 978-602-422-780-7

14 x 20,5 cm

xiv, 240 hlm

Cetakan ke-1, Februari 2019

Kencana. 2019.1035

Penulis

Dr. Dra. Kismartini, M.Si.

Prof. Dr. Burhan Bungin, M.Si., Ph.D.

Desain Sampul

Irfan Fahmi

Penata Letak

Wanda

Penerbit

PRENADAMEDIA GROUP

(Divisi Kencana)

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberi kemampuan kepada kami berdua untuk menyelesaikan naskah buku ini, hingga dapat dibaca oleh pembaca sekalian.

Naskah buku ini pada awalnya adalah naskah disertasi dari Dr. Dra. Kismartini, M.Si., yang dibuat di Universitas Brawijaya Malang dan merupakan hasil kajian masalah kebijakan publik wilayah pesisir di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Namun karena pentingnya masalah kajian wilayah pesisir ini untuk Indonesia maka kajian tersebut diperluas menjadi kajian daerah wilayah pesisir di seluruh Indonesia. Dengan demikian, kajian buku ini kami perluas menjadi kajian wilayah pesisir Indonesia atau bahkan pesisir regional Indonesia dan negara-negara di sekitarnya.

Betapa pun masalah pesisir di setiap negara adalah masalah yang dihadapi oleh negara itu dengan berbagai dinamika sosial, budaya maupun politik, oleh karena itu sentuhan kebijakan publik menjadi penting pada kajian ini. Kami berpandangan bahwa kebijakan publik merupakan pendekatan terpenting dari masalah-masalah wilayah pesisir, terutama negara-negara yang memiliki daerah pantai terluas seperti Indonesia ini. Oleh karena itu, kajian

Masalah-masalah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, juga tidak saja dialami oleh Indonesia, namun negara-negara lain juga ikut merasakannya, karenanya kajian ini juga menyajikan beberapa tulisan yang mengkaji masalah ini di negara-negara lain, khususnya di Brasil yang kebijakannya telah menjangkau lebih banyak persoalan wilayah pesisir. Kendati Indonesia telah memiliki tekad yang kuat mengatasi masalah wilayah pesisir, namun akhirnya ini kelihatannya mulai mengendur, walau semangatnya masih terus membara.

Secara pribadi, Dr. Dra. Kismartini, M.Si., memiliki pengalaman dalam risetnya di Kabupaten Rembang Jawa Tengah namun Prof. Dr. Burhan Bungin, M.Si., Ph.D., memiliki pengalaman praktis mengenai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini disebabkan ia terlahir dan besar serta bersekolah di daerah kepulauan Banda Neira Maluku Tengah, gugusan pulau terpencil di tengah lautan Banda yang tentunya sarat dengan apa yang dikaji di dalam buku ini, sehingga ketika diajak bersama menulis buku ini, terasa bahwa kami berdua memiliki pengalaman yang serasi dalam mengkaji masalah ini, yang satu memiliki pengalaman akademis dan yang lain memiliki pengaman praktis di lapangan, sehingga dengan saling melengkapi, tulisan ini diselesaikan bersama.

Kami ucapkan terima kasih kepada Mahfud Effendy dan L. Wever, M. Glaser, P. Gorris, D. Ferrol-Schulte, yang telah mengizinkan kami mengutip tulisannya di buku ini agar dapat lagi melengkapi kajian buku ini secara lebih komprehensif.

Terima kasih juga kepada rekan-rekan kami di Universitas Diponegoro Semarang, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya serta Universitas Ciputra yang telah mendorong kami berdua menyelesaikan buku ini dengan susah payah, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Semarang/Surabaya,
Desember 2018

Kismartini/Burhan Bungin

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR & TABEL	vii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Wilayah Perseki Indonesia	1
1.2 Kondisi Kehari Pangan Kita	12
1.3 Kondisi Kebijakan Pangan Petani	13
1.4 Implementasi Kebijakan Daerah Petani	21
1.5 Implementasi Kebijakan Pengembangan Wilayah Perseki (PWP)	25
1.6 Pembangunan Berkelanjutan PWP	30
1.7 Ruang Lingkup Implementasi PWP	32
2. KEBIJAKAN PANGANI DAERAH WILAYAH PERSEKI	35
2.1 Kebijakan Pada Sektor Sektor Tersebut	35
2.2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Perseki dan Pulau-pulau Kecil (UUPPK)	37
2.3 Pemanfaatan Daerah Perseki	37
2.4 Penguasaan dan Pengelolaan	38
2.5 Mekanisme Akademi Daerah Perseki	39

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR & TABEL	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Wilayah Pesisir Indonesia.....	1
1.2 Kondisi Kajian Pesisir Saat ini	12
1.3 Konsep Kebijakan Publik Pesisir	18
1.4 Implementasi Kebijakan Daerah Pesisir.....	26
1.5 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir (PWP)	45
1.6 Pembangunan Berkelanjutan PWP.....	60
1.7 Ruang Lingkup Implementasi PWP	68
BAB 2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR	75
2.1 Kebijakan Pada Sektor-sektor Terkait	75
2.2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K)	87
2.3 Pemanfaatan Daerah Pesisir.....	97
2.4 Pengawasan dan Pengendalian	102
2.5 Masalah Aktual Daerah Pesisir.....	104

BAB 3 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR	109
3.1 Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir, Kasus Kabupaten Rembang Jawa Tengah	109
3.2 Peran Aktor/ <i>Stakeholder</i> dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kabupaten Rembang	133
3.3 Koordinasi Pengelolaan Pesisir	140
3.4 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan	144
 BAB 4 PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR SECARA TERPADU: PEMANFAATAN RUANG, SUMBER DAYA, DAN KAPASITAS ASIMILASI WILAYAH PESISIR	 153
4.1 Definisi Pesisir dan Masyarakat Pesisir	153
4.2 Potensi Wilayah Pesisir	155
4.3 Permasalahan Wilayah Pesisir	156
4.4 Pengelolaan Terpadu	158
 BAB 5 DESENTRALISASI DAN PARTISIPASI DALAM PENGELOLAAN PESISIR TERPADU: PELAJARAN KEBIJAKAN DARI BRASIL DAN INDONESIA	 163
5.1 Perkenalan.....	163
5.2 Perubahan Hukum dan Kebijakan di Brasil dan Indonesia	166
5.3 Pengesahan UU Pengelolaan Pulau Pesisir dan Pulau Kecil	168
5.4 Perubahan Hukum Terkait	169
5.5 Prestasi Pelaksanaan	172
5.6 Tantangan Pelaksanaan	176
5.7 Prospek Wilayah Pesisir	188
5.8 Perhatian Pemerintah Indonesia	190
 BAB 6 MENKRITISI KEBIJAKAN-KEBIJAKAN WILAYAH PESISIR	 193
6.1 Mengkritisi Daerah Pesisir	193
6.2 Rekomendasi	196
6.3 Implikasi Teoretis	197
 BAB 7 METODE PENELITIAN WILAYAH PESISIR	 201
7.1 Pengantar	201
7.2 Jenis Penelitian	201

7.3 Fokus Penelitian.....	203
7.4 Lokasi dan Situs Penelitian.....	204
7.5 Sumber Data	205
7.6 Instrumen Penelitian.....	207
7.7 Strategi dan Teknik Pengumpulan Data.....	208
7.8 Analisis Data Penelitian	211
7.9 Keabsahan Data.....	213
7.10 Alur Kerangka Pemikiran Penelitian.....	215
REFERENSI	219
PARA PENULIS	235